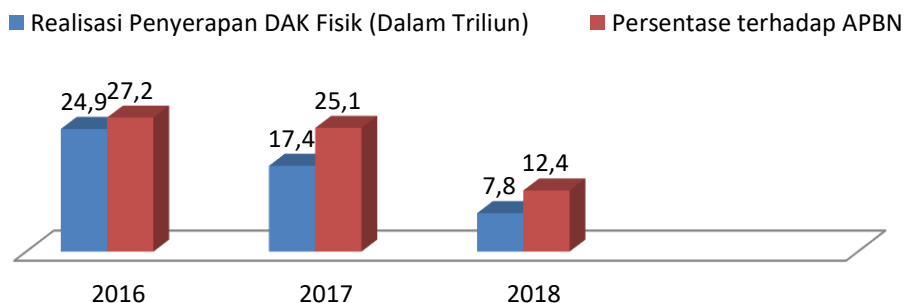


## Evaluasi Penyerapan DAK Fisik di Daerah Semester I Tahun 2018

Dalam rapat kerja penyampaian keterangan pemerintah atas realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN semester I 2018 antara Badan Anggaran DPR RI, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia tanggal 17 Juli 2018, Pemerintah menyampaikan adanya sejumlah masalah dalam pelaksanaan realisasi APBN di semester pertama tahun 2018. Salah satu masalah yang disoroti adalah rendahnya realisasi penyerapan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) pada semester I 2018.

### Realisasi DAK Fisik Tahun 2016 - 2018



Pada tahun 2018 pemerintah mengalokasikan DAK Fisik sebesar Rp62,43 triliun dimana proses penyalurannya dibagi dalam 3 tahap. Untuk tahap I penyaluran sebesar 25% dari pagu alokasi yang pencairannya dilaksanakan antara bulan Februari – Juli 2018. Berdasarkan laporan dari Kementerian Keuangan realisasi penyerapan DAK fisik pada semester I 2018 hanya sebesar Rp7,8 triliun atau 12,4% terhadap APBN. Jumlah ini menurun drastis dibandingkan dengan realisasi semester I pada tahun 2017 yang mencapai Rp17,4 triliun atau 25,1% terhadap APBN.

Berdasarkan laporan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, penyebab dari menurunnya realisasi penyerapan DAK Fisik pada semester pertama tahun 2018 akibat adanya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Pergantian pucuk kepemimpinan di daerah berdampak pada kebijakan pembuatan kontrak proyek infrastruktur. Kurang sinkronnya perencanaan antara kementerian/lembaga dan daerah juga menjadi penyebab keterlambatan penyaluran DAK Fisik pada semester ini.

Dari sisi perencanaan masih terdapat permasalahan kurang tepatnya penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tambahan kepada sejumlah daerah. Hingga saat ini masih terdapat berbagai fokus permasalahan, antara lain sejumlah daerah mendapatkan alokasi lebih besar dari proposal yang diajukan, mengajukan alokasi tetapi tidak memperoleh dana alokasi, tidak mengajukan alokasi tetapi mendapatkan dana alokasi.

No	Jenis Masalah DAK Fisik	Jumlah
1	Mengusulkan alokasi tetapi tidak memperoleh dana alokasi.	109
2	Tidak mengusulkan alokasi tetapi mendapatkan dana alokasi	88
3	Mendapatkan alokasi lebih besar dari proposal yang diajukan	31

Kemudian, permasalahan realisasi DAK Fisik yang belum optimal disebabkan karena adanya perubahan mendasar mengenai mekanisme alokasi DAK Fisik. Pengalokasian DAK Fisik di tahun 2016 dilakukan dengan mekanisme *bottom-up* agar alokasi DAK Fisik sesuai dengan kebutuhan daerah dan prioritas nasional. Mekanisme *bottom-up* dilakukan dengan cara penyampaian usulan (*proposal based*) oleh daerah sebagai dasar untuk penentuan alokasi.

Hal ini berbeda dengan pengalokasian DAK pada tahun-tahun sebelumnya yang lebih banyak bersifat *topdown*, yakni sepenuhnya ditentukan oleh Pemerintah Pusat dengan menggunakan tiga kriteria, yaitu kriteria umum yang terkait dengan kemampuan keuangan daerah, kriteria khusus yang terkait dengan kewilayahan, dan kriteria teknis yang terkait dengan data kebutuhan teknis daerah.

Merosotnya realisasi penyerapan DAK fisik ini harus menjadi fokus evaluasi pemerintah. Jika DAK Fisik dapat terserap dengan baik maka akan mampu mendorong program prioritas kerja pemerintah. Pertumbuhan infrastruktur dapat membantu pemerataan pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur seperti jalan dan jembatan dapat mengintegrasikan daerah satu dengan yang lainnya. Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi dengan daerah penerima DAK Fisik. Selain itu penguatan komunikasi antar lembaga terkait seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Direktorat Jenderal Anggaran pada saat penyusunan anggaran akan meminimalisir terlambatnya pencairan DAK Fisik.